

**PENGELOLAAN PREMI KESEHATAN SANTRI BERDASARKAN PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA POSKESTREN MIFTAHUL ULUM  
BETET PAMEKASAN**

**Moh. Halimi , Agus Sugiono**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura

Email: [agusuimak@fe.uim.ac.id](mailto:agusuimak@fe.uim.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the management of santri health premium funds based on GOOD CORPORATE GOVERNANCE principles at the MiftahulUlumBetetPamekasan Post. The type of research method used is descriptive qualitative. Data sources needed are secondary data and primary data. The data collection method uses interviews and documentation.*

*The results of this study indicate that the management of santri health premium funds has applied the principles of good financial governance, and has a positive value on the management of poskestren funds or premiums, which starts from the principles of transparency, accountability, responsiveness, independence, and fairness. Poskestren conducts fund management, starting from the budget and income as well as policies to all boarding school residents and surrounding areas, and is also responsible for all activities that are determined.*

*Key words: Premium, Good Corporate Governance, Poskestren*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana premi kesehatan santri berdasarkan prinsip *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* pada Poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana premi kesehatan santri telah menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik, dan memiliki nilai yang positif terhadap pengelolaan dana atau premi poskestren, yaitu mulai dari adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independen, dan fairness. Poskestren melakukan pengelolaan dana mulai dari anggaran dan pendapatan serta kebijakan kepada seluruh warga pondok pesantren dan sekitarnya, dan juga bertanggungjawab atas segala kegiatan yang di tetapkan.

Kata kunci: Premi, *Good Corporate Governance*, Poskestren

**PENDAHULUAN**

Pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan nonformal dibidang keagamaan islam yang banyak diminati oleh masyarakat jawa timur bahkan di Indonesia. Menurut data kantor departemen agama (2007), bahwa jumlah pondok pesantren di Jawa Timur ada 3800-an. Jumlah ini menggambarkan besarnya kepeminatan masyarakat Jawa timur untuk memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak untuk menjadi santri. Pesantren sebagai lembaga yang mengiringi dakwah islamiyah di Indonesia memiliki persepsi yang plural. Pesantren bisa dipandang sebagai lembaga ritual, lembaga

pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling populer adalah institusi pendidikan islam yang mengalami romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah eksis di tengah masyarakat selama enam abad mulai abad ke 15 hingga sekarang dan sejak awal berdirinya menawarkan pendidikan (Qomar, 2006) Menurut fungsinya, pesantren disamping sebagai pendidikan islam sekaligus merupakan penolong bagi masyarakat dan tetap mendapat kepercayaan di mata masyarakat. Jadi pesantren yang di maksud dalam hal ini suatu lembaga pendidikan islam yang didirikan di tengah-tengah masyarakat yang didalamnya dari pengasuh atau pendidik, santri, alat-alat pendidikan dan pengajaran serta tujuan yang dialami.

Di pondok pesantren terdapat salah satunya santri mukim. Santri mukim yaitu santri yang mondok (mukim) selama belajar di dalam lingkungan pesantren. Selama tinggal di pesantren umumnya santri mukim mengalami proses dan cara hidup sederhana karena alasan keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana dalam pondok pesantren. Dari fasilitas yang diterima, cara hidup semua rata-rata yang tinggal di pondok pesantren tergolong sederhana dan jauh dari fasilitas yang diterima. Dari faktor-faktor inilah apa yang dilakukan para santri menjadi terbatas. Terutama dalam perilaku kesehatan, terdapat kebiasaan para santri tergolong dibawah standar kesehatan, perilaku tersebut dinamakan perilaku akit.

Poskestren sebagai organisasi swasta yang di kelola oleh yayasan yang menjadi ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di pesantren yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap santri dan masyarakat sekitarnya. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Poskestren kepada santri dalam program Poskestren. Santri harus melakukan pembayaran Kesehatan dengan tarif yang telah di tentukan oleh Poskestren. Tarif atau sering disebut dana iuran merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Poskestren berdasarkan jumlah santri yang terdaftar di pondok pesantren tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Poskestren. Tarif atau iuran digunakan untuk administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, obat dan bahan medis habis pakai.

Pemanfaatan dana iuran untuk biaya operasional pelayanan kesehatan salah satunya digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, belum secara detail diatur tentang belanja barang operasional dan belanja modal untuksarana dan prasarana di poskestren. Hal ini menyebabkan poskestren belum optimal merealisasikan dana iuran untuk peningkatan sarana prasarana di Poskestren, sehingga realisasi penggunaan dana iuran pada tahun berjalan masih lambat dan belum terlihat serta dirasakan realisasinya oleh santri yang berobat ke poskestren. Sedangkan pelaksanaannya, pemanfaatan dana iuran belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari poskestren yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan, adanya transparansi dan akuntabilitas di rasa masih kurang baik. Hal ini memungkinkan karena belum di implimentasikan sepenuhnya prinsip *goog corporate governance* (Parasatyo, 2007) sehingga terdapat Poskestren yang belum tertib administrasi.

Salah satu cara yang ditempuh petugas poskestren untuk mengetahui pengelolaan premi atau iuran hasil kerja yang baik dan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan adalah melalui manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG) memegang peranan

penting, sebagai sarana untuk mengetahui tata kelola keuangan suatu organisasi yang baik (Surya, 2008).

Penelitian mengenai penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan telah banyak yang meneliti, namun masih sedikit yang menjadikan poskestren sebagai objek penelitian. Berdasarkan informasi, masih jarang bahkan dapat dikatakan sedikit yang meneliti tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di poskestren. Peneliti ingin membuktikan penerapan kelima prinsip *good corporate governance* yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, indenpen dan fairness pada pengelolaan keuangan Poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan.

Konsep *good corporate governance* (GCG) pada poskestren sering di sebut sebagai sistem tata kelola keuangan poskestren, konsep ini sama dengan konsep sistem tata kelola keuangan kesehatan pada umumnya, namun di sesuaikan aplikasinya pada dua jenis layanan kesehatan ini. Menerapkan prinsip-prinsip *Good corporate governance*, pada prakteknya tidaklah mudah apalagi untuk mengetahui pengelolaan keuangan kesehatan santri (poskestren). Kendala-kendala yang di hadapi baik itu internal maupun eksternal menghambat proses penerapan *good corporate governance* pada kesehatan santri (poskestren).

### **Fokus Masalah**

Melihat berbagai kondisi di atas mengenai berbagai pandangan tentang analisis pengelolaan premi kesehatan santri yang mengacu pada berbagai sudut pandang dan latar belakang mereka masing masing, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada satu permasalahan bagaimana pengelolaan premi kesehatan santri pada poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan berdasarkan prinsip *good corporate governance* (GCG) ?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan premi kesehatan santri (poskestren) Miftahul Ulum Betet Pamekasan, berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Penelitian Terdahulu**

Mulyati (2011) meneliti tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009). Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan merupakan tolak ukur yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. kondisi perusahaan yang baik akan menarik para investor untuk menanamkan modal mereka sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila kondisi perusahaan tersebut buruk maka system pengelolaan perusahaan tersebut ditingkatkan lagi sehingga mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Salah satunya dengan menerapkan *good corporate governance*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara simultan terdapat pengaruh antara variable kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara parsial hanya kepemilikan manajerial dan komite audit yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Saran

untuk manajemen perusahaan adalah kepemilikan institusional dan komisaris independen hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pengelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Untuk penelitian selanjutnya dapat mencoba menggunakan perhitungan kinerja keuangan yang lebih kompleks untuk melihat konsistensi hasil penelitian dengan menggunakan harga saham, seperti *Economic Value Added* (EVA).

Ulfa (2017). Meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks tahun (2011-2015). Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh langsung *good corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan serta pengaruh tidak langsungnya melalui profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011–2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Putri (2017) meneliti tentang pengaruh struktur *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sector pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan (ROA) pada perusahaan sektor pertambangan. Komponen *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit. Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yang menggunakan data laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Hasil penelitian membuktikan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit, maka akan meningkatkan kinerja sebuah perusahaannya.

## **LandasanTeori**

### **Pengertian Poskestren**

Pos kesehatan pesantren (poskestren) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif, dengan binaan puskesmas setempat. Pos kesehatan pesantren (Poskestren) adalah pesantren yang memiliki kesiapan, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri secara mandiri sesuai dengan kemampuannya. Poskestren merupakan salah satu wujud upaya kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan pesantren dengan prinsip dari, oleh dan untuk warga pesantren yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihankesehatan) dengan binaan puskesmas setempat. Tempat untuk poskestren berada dalam lingkungan pesantren itu

sendiri dan bisa memanfaatkan ruangan serbaguna maupun ruangan di masjid atau mushala.

### **Pengertian Pengelolaan Premi**

Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan Arikunto (2002). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Handoko (2008) merumuskan pengelolaan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan juga diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam mengatur dan menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi agar mereka bekerja dengan sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya.

Nanang (2011) mengartikan pengelolaan sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan dan memberdayakan semua sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Pengelolaan adalah seni. Seni dalam mengorganisasi sesuatu untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Nanang (2011) pengelolaan kesehatan sendiri mengandung arti suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Salah satu obyek garapan dalam pengelolaan kesehatan adalah pengelolaan keuangan. Program kesehatan santri yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan keuangan yang baik. Keuangan kesehatan santri merupakan bagian yang amat penting sebab setiap kegiatan membutuhkan pendanaan (uang). Untuk itu, perlu pengelolaan keuangan yang baik sehingga seluruh program kesehatan santri yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. pengelolaan keuangan merupakan aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu pengelolaan kesehatan.

Oleh karena itu, manajemen keuangan kesehatan santri pada dasarnya merupakan bagian dari pembiayaan lembaga pondok pesantren yang tercermin dari anggaran yang ditetapkan yayasan pondok pesantren, sehingga untuk bidang ini perlu penanganan yang serius, agar dicapai suatu pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran serta program-program yang dibiayainya dalam mencapai tujuan kesehatan santri. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan adalah tata pembukuan yang meliputi segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai organisasi berupa

tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan. Pada prosesnya manajemen keuangan adalah melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenagaorang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dalam pengelolaan keuangan di kesehatan santri (poskestren) dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasandan pertanggungjawaban keuangan.

### **Pengertian Premi**

Dalam bahasa Inggris premi berarti premium yaitu uang angsuran kepada perusahaan asuransi, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia premi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh yang akan memperoleh ganti rugi. Muhammad (2003) berpendapat premi itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung.

### ***Prinsip Pengelolaan Good Corporate Governance (GCG)***

Kualitas informasi keuangan dalam perusahaan penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dan juga mengetahui kondisikeuangan perusahaan. Sejalan dengan *Statement of financial accounting concept* (SFAC) No.2: *qualitative characteristics of accounting information* menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan berguna dalam menyakinkan bahwa informasi keuangan adalah bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi (FASB 1980). Karakteristik kualitatif utama dalam kualitas informasi keuangan yaitu relevan serta reliabel, dimana kualitas relevan berkaitan dengan materialitas, sedangkan karakteristik selanjutnya mencakup ketepatan waktu dan konsistensi. Kualitas informasi keuangan memiliki empat karakteristik pokok yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (IAI, 2007). Tingkat relevan suatu informasi keuangan dapat dilihat dari kualitas informasi tersebut dalam mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai infomasi.

Selain itu informasi juga harus andal (reliable) yang artinya informasi tersebut disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. Informasi keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lain pada umumnya dan harus disajikan dengan baik agar dapat dipahami oleh pengguna. Dalam hal ini tata kelola perusahaan mengambil peranan dalam mempengaruhi kualitas informasi keuangan di perusahaan.

*Good corporate governance* (GCG) merupakan perwujudan dari tata kelola organisasi yang baik, berperan dalam mengatur serta mengendalikan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam memperoleh informasi keuangan perusahaan yang disampaikan secara akurat, kualitas organisasitepat waktu dan transparan (YPPMI, 2002).

Untuk meningkatkan kualitas keuangan, perusahaan perlu mengikuti pengelolaan yang diterapkan secara konsisten. Sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat digunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan tata kelola keuangan yang baik.

Todorovice (2012) menyatakan bahwa salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing diwujudkan melalui *corporate governance*. Sebagai organisasi yang memberikan

pelayanan secara langsung kepada masyarakat (pelanggan) kualitas tata kelola maupun citra perusahaan harus diperhatikan untuk keberlangsungan organisasi. *Corporate Governance* berperan dalam membangun kredibilitas dengan memastikan akuntabilitas, menjaga keefektifan serta keterbukaan penyampaian informasi yang nantinya mampu mendorong perusahaan memiliki kualitas yang baik.

Perusahaan adalah salah satu organisasi yang bertanggung jawab dalam melayani dan memberi pelayanan kepada konsumen. perusahaan juga berperan dalam melaksanakan pengembangan melalui fasilitas perusahaan, serta memberikan pelayanan secara jujur dan transparan. Sehingga perusahaan harus menerapkan prinsip ekonomi yang sehat dalam penyelenggaraan maupun sistem tatakelola kesehatan.

Pada tahun 2006 komite nasional kebijakan governance (KNKG) menerbitkan pedoman pelaksanaan *good corporate governance* sebagai dorongan agar perusahaan mampu menciptakan sistem tata kelola yang sehat. KNKG (2006) menyebutkan lima prinsip GCG yaitu *transparancy* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Good Corporate Governance*, yaitu:

### **1. Transparansi**

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, konsumen harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat disebut transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh masyarakat dalam kemampuannya untuk membuat keputusan serta memberikan informasi terkait kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki pengelolaan dana yang sesuai dengan aturan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan pihak luar untuk memperkirakan nilai dan laporan keuangan dan laporan insidentil.

Dengan di terapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kualitas mutu perusahaan, pihak perusahaan harus menerpakan prinsip prinsip keuanagan khususnya dalam bidang transparansi pengelolaan keuangan. Transparansi berasal dari informasi tanpa adanya informasi transparansi tidak akan terlaksana. Dengan adanya transparansi maka *stakeholder* perusahaan akan mengetahui pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan sehingga tidak akan manipulasi data.

Mardiasmo (2003) transparansi berarti keterbukan (*open prosoes*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi, pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan di gunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak pihak yang berkepentingan

Teori dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak tahu tentang informasi keuangan maka untuk menghindari terjadinya asimetri informasi diperlukan keterbukaan informasi atau transparansi. Keterbukaan (*transparansi*)

diperlukan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan pelayanan dan memberikan keyakinan terhadap pelanggan. Dalam perusahaan transparansi penting karena berhubungan dengan informasi keuangan yang akan disajikan oleh perusahaan.

## **2. Akuntabilitas**

Menurut Salim (2004), akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *Accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan yang dipertanggung jawabkan atau keadaan yang diminta pertanggung jawaban. Minarti (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Mardiasmo (2005) menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara poskestren dengan menerima masukan dan mengikut seratakan berbagai komponen dalam mengelola poskestren, (2) adanya standar kinerja, di setiap institusi yang dapat di ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat (santri) dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

Definisi di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan atau pengelolaan keuangan suatu lembaga kesehatan atau perorangan dapat di pertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan stakeholder dari suatu lembaga kesehatan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut maka akuntabilitas dapat di artikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut kegiatan seseorang atau suatu lembaga kesehatan terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

## **3. Responsibilitas**

Responsibilitas (pertanggung jawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi atau poskestren terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Pengertian responsibilitas menurut kamus administrasi adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkannya.

Menurut Azheri (2012) responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.



Azheri (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu: *responsibility having the character of a free moral agent; capable of determining one's act; capable deterred by consideration of sanction or consequences*. Dimana dari pengertian diatas dicatat dua hal yaitu; (1). Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan (2). Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan. Dalam kata *having the character* terkandung makna ada tuntutan berupa suatu keharusan atau kewajiban yang didalamnya sekaligus mengandung makna moral/karakter. Karakter yang dimaksud merupakan suatu yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan.

#### **4. Independen**

Independen atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi dalam perusahaan adalah sebagai berikut: (a). Masing-masing organ organisasi poskestren harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. (b). Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### **5. Fairness**

Penerapannya di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Konsep kesetaraan dan kewajaran dalam perusahaan atau organisasi harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan, dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi. Kondisi aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi-informasi terbaru. Disamping itu, dalam hal penyerapan tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah calon tenaga kerja yang ada di Indonesia belum dapat terserap secara menyeluruh.

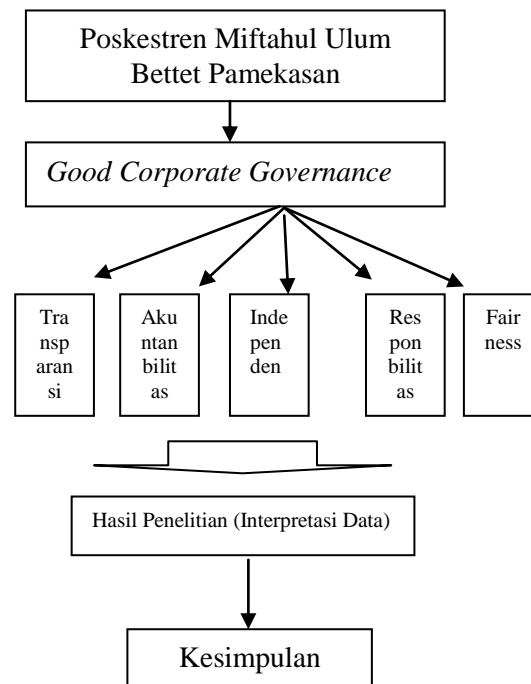
*Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati). Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, petugas harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pengelolaan keuangan dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip kesetaraan adalah sebagai berikut: (a). Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan poskestren serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. (b). Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada poskestren. (c). Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan layanan masyarakat atau santri dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisifisik.

### Kerangka Berfikir

*Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan atau organisasi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Ada beberapa prinsip yang wajib dijalankan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di poskestren, seperti dalam gambar berikut ini:



## METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang hasilnya berupa data diskriptif melalui pengumpulan fakta fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti sendiri.

Sukmadinata (2006) menjelaskan penelitian kualitatif (*qualitative research*) sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif tentang pengelolaan premi kesehatan santri di Miftahul Ulum Betet Pamekasan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

## **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan Madura.

## **Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Jadi, sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus di peroleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang di teliti. Adapun sumber data yang di manfaatkan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

### ***Data Primer***

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala poskestren dan pihak-pihak yang berwenang lainnya yang berupa data profil poskestren, struktur organisasi, pengelolaan premi, sarana dan prasarana serta deskripsi pelayanan yang diberikan Poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan kepada santri atau pasien.

### ***Data Sekunder***

Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu diperoleh dari sumber penelitian yang berupa dokumen tentang pengelolaan premi atau iuran kesehatan kemudian di bandingkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan data bulanan yang berupa data mengenai dana pembiayaan poskestren.

## **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode interview dan dokumentasi.

## **Metode Analisis Data**

Sugiono (2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Metode analisis data yang di gunakan pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

### **a. *Data Reduction (Reduksi Data)***

Sugiono (2012) berpendapat bahwa reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah (1). Mendokumentasikan data-data tentang daftar tarif premi dan jumlah santri yang di gunakan oleh pihak poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan (2). Menganalisis pencatatan serta pengelolaan premi pada poskestren dan membandingkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, dan faernes.

### **b. *Penyajian Data (Dispay Data)***

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data ini dapat di lakukan dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitan ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian berlangsung dan mendeskripsikan hasil dari

penelitian yang di lakukan selama berada di lapangan. Dalam penyajian data, penulis dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan premi kesetan santri di poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan.

Ketiga komponen analisa tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Tampilan data yang di hasilkan digunakan untuk interpretasi setelah di adakan *crosscheck* terhadap sumber lain melalui wawancara, pengamatan dan observasi.

### **c. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan)**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dari hasil penyajian data yang di peroleh maka akan menyimpulkan pengelolaan premi kesehatan santri berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* di poskestren Miftahul Uum Betet Pamekasan. Hasil penelitian ini dapat di hasilkan melalui pengolahan data yang di mulai dari pereduksian data dan lanjutkan dengan penyajian data yang di hasilkan lewat wawancara terhadap objek ataupun responden yang telah di tentukan, dari hasil tersebut kitabiasmenyimpulkan bagaimana pengelolaan premi kesehatan santri pada poskestren berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Miftahul Ulum Betet Pamekasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana/iuran di poskestren berdasarkan *Good Corporate Governance*. peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini hasil pengumpulan data yang telah diperoleh dari Poskestren Miftahl Ulum Betet Pamekasan yang akan dijelaskan secara terperinci, pengelolaan dana poskestren

### **Transparansi Dana Poskestren**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan dana poskestren, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak poskestren dalam menjalankan undang-undang sistem kesehatan tentang pengelolaan dana poskestren.

Pengelolaan dana poskestren dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independen, dan faernes. Transparansi. Transparansi dalam pengelolaan dana di poskestren sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan santri, masyarakat, dan menjadikan poskestren tersebut bermutu. Keterbukaan terhadap pengelolaan poskestren sangat penting dilakukan, sehingga semua pihak poskestren mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana poskestren. Keterbukaan antar komponen poskestren atau warga pesantren akan menimbulkan dampak positif. Adanya ikatan saling percaya antar semua warga pesantren akan menyebabkan poskestren tersebut dapat dipercaya masyarakat luas.

Prinsip transparansi dilakukan mulai dari awal yaitu penganggaran dana poskestren. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh **Ust. H. Amiruddin, S.H** selaku Bendahara poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan.

*“Perencanaan anggaran disusun oleh petugas poskestren yang tergabung dalam satu standar, dilakukan awal tahun untuk merencanakan satu tahun anggaran. Keterbukaan dalam penganggaran in idapat diketahui oleh semua petugas dan*

*diketahui oleh Kepala poskestren bukan hanya bendahara. Untuk keterbukaan terhadap santri biasanya diadakan pengumuman satu tahun sekali pada awal ajaran”*

Hal ini sesuai dengan pendapat bendahara poskestren:

*“Alasan dari penerapan prinsip transparansi dana poskestren yaitu melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebijakan yang telah ditentukan oleh poskestren. Dengan kewajiban tersebut maka poskestren harus melaksanakannya. Untuk manfaatnya yaitu dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, meningkatkan kepercayaan santri, dan juga masyarakat*

### **Akuntabilitas dana poskestren**

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran dana poskestren sesuai dengan petunjuk teknis. Selanjutnya, poskestren membuat laporan keuangan untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk mengevaluasi laporan tersebut dilakukan oleh Kepala poskestren dan Bendahara poskestren. dengan adanya keterlibatan dari beberapa pihak baik internal maupun eksternal maka poskestren dapat menjadi kepercayaan santri dan masyarakat. Hal ini menjadikan poskestren memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poskestren melakukan prinsip akuntabilitas. Dalam pengarsipan dokumen keuangan dilakukan oleh Bendahara poskestren. dengan tujuan Bendahara dapat dengan mudah memeriksa dan mengelola dokumen yang berkaitan dengan keuangan poskestren. Alasan dan manfaat poskestren menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan selain itu dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi santri dan masyarakat terhadap poskestren tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh ust. Badrudtamam selaku sekretaris poskestren mengatakan bahwa:

*“Pembuatan laporan keuangan dana poskestren dapat diketahui oleh santri ketika berada di poskestren. laporan tersebut dapat membuat santri memberikan kepercayaan terhadap poskestren. Hal ini menjadikan poskestren menjadi kepercayaan santri dan masyarakat”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Ust. Iklil Nasir sebagai petugas mengatakan:

*“Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban poskestren terhadap warga pesantren terutama santri yang sakit, harus melakukan pelayanan pengobatan terhadap santri”.*

### **Responibilitas Dana Poskestren**

Tanggung jawab merupakan bentuk kepatuhan poskestren terhadap hukum dan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial terhadap kepedulian masyarakat dan santri di lingkungan disekitar. Seluruh petugas poskesren sudah menaati peraturan poskestren yang sudah ada, namun menurut narasumber yang lain terkadang masih ada juga yang melanggarnya. Kemudian terkait dengan standar penggajian, poskestren sudah melakukan sesuai dengan peraturan. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh ust. Badrudtamam selaku sekretaris poskestren mengatakan bahwa:

*“Terkait tanggung jawab terhadap santri, poskestren setiap tahunnya mengadakan bakti sosial, seperti memberikan pelayanan secara serentak kepada santri yang membutuhkan vitamin dan lain-lain*

Hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan. Kemudian masih ada petugas yang bekerja yang tidak sesuai dengan jobdesknya hal tersebut diakui oleh narasumber.

### **Independensi dana poskestren**

Terkait independensi dana, poskestren sejauh ini mengelola keuangan secara sederhana, hal ini diakui narasumber bila terjadi konflik dalam poskestren maka seluruh pihak ikut mencari solusinya Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara dengan petugas poskestren yang menyatakan:

*“Adanya poskestren ini merupakan bagian dari adanya pesantren dan poskestren ini sepenuhnya di kelola oleh pengurus pesantren jadi apa saja kebutuhan dalam poskestren adalah menjadi taanggung jawab poskestren tanpa melibatkan pihak lain”.*

### **Fairnes/kesetaraan**

Dalam prinsip fairnes disebutkan bahwa perusahaan atau organisasi harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan Dalam hal ini poskestren sudah menerapkannya dengan baik. poskestren memberikan kesempatan kepada seluruh petugas untuk menyampaikan pendapat dan memberi saran. Perlakuan terhadap petugas yang melakukan kesalahan juga diperlakukan secara adil dan tidak adanya saling menjahui satu sama lain. poskestren juga menerima saran dan kritik serta komplain dari dari luar. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh ust. Iksan selaku petugas poskestren mengatakan bahwa:

*“Mengenai adanya kepuasan dan kesetaraan, poskestren in isuda hmemberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memberikan masukan dan saran serta kritikan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu poskestren”.*

### **Analisis Data**

#### **Transparansi Dana Poskestren**

Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Selain itu, konsumen harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Teori dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak tahu tentang informasi keuangan maka untuk menghindari terjadinya asimetri informasi diperlukan keterbukaan informasi atau transparansi. Keterbukaan diperlukan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan pelayanan dan memberikan keyakinan terhadap pelanggan. Dalam perusahaan transparansi penting karena berhubungan dengan informasi keuangan yang akan disajikan oleh perusahaan. Anggraini (2013) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran dana sangat diperlukan demi terlaksananya semua program yang direncanakan.

Hasil pengumpulan data yang berhasil penulis kumpulkan melalui metode wawancara dengan petugas poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan, mengatakan bahwa adanya keterbukaan informasi khususnya dalam bidang keuangan telah memberikan akses kepada pihak yang membutuhkan, sehingga bagi santri bisa dengan mudah untuk mengetahui adanya informasi yang telah di sediakan poskestren. Pihak poskestren juga menjelaskan tentang penggunaan dana poskestren secara terinci meliputi sumber keuangan, jumlah yang diterima dalam 1 bulan dan 1 tahun, rencana kegiatan yang akan di lakukan serta penggunaan dana poskestren yang benar sesuai pedoman petunjuk teknis, sehingga memudahkan petugas poskestren untuk mengetahui informasi tentang dana poskestren.

### Perencanaan Anggaran Dana Poskestren

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
03/09/18	Belanjaobat-obatan	4.000.000
05/10/18	Belanjarehabilitasi	2.500.000
25/10/18	Belanjaprasarana	3.000.000
01/11/18	Pembayaranongkos	1.300.000
02/11/18	Biaya program	1.700.000
	<b>Jumlah</b>	<b>16.000.000</b>

(Sumber Laporan poskestrentahun anggaran 2018)

Anggaran yang telah dibuat oleh poskestren dialokasikan untuk kegiatan operasional poskestren guna untuk peningkatan kualitas poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan, serta untuk mengembangkan proses kesehatan. Dengan merencanakan anggaran dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan maka dapat meningkatkan kualitas poskestren.

#### Akuntabilitas dana poskestren

Akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu lembaga kesehatan atau perorangan dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan *stakeholder* dari suatu lembaga kesehatan tersebut. Lembaga tersebut mempunyai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut kegiatan seseorang atau suatu lembaga kesehatan terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Adanya akuntabilitas menegaskan bahwa bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen lembaga, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi, bahkan, dapat di katakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen lembaga yang lebih tinggi.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di poskestren. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan keuangan poskestren menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas poskestren dilakukan dengan melakukan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana poskestren. Poskestren dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapaitujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta manfaat.

Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan darihasil wawancara petugas poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan yang mengatakan bahwa pihak poskestren melakukan penyajian serta melaporkan segala tindak lanjut kegiatan dalam bidang administrasi keuangan yang kemudian di laporkan kepada yang bertanggungjawab sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi.

#### Penerimaan dana poskestren

TANGGAL	PENERIMAAN	
	Uraian	Jumlah
02/11/18	Iuran sa nt ri	16.210.000
	<b>Jumlah</b>	<b>16.210.000</b>

(Sumber Laporan poskestren tahun anggaran 2018)

Penerimaan dana poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan pada tahun ajaran 2018/2019 bersumber dari santri berupa iuran sejumlah Rp. 16.210.000, dengan perincian 1.621.000 santri  $\times$  Rp. 10.000. Berdasarkan perincian tersebut perhitungan dana iuran sesuai dengan perhitungan jumlah banyaknya santri. Penanggung jawab dana poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan adalah Ust. Ali muhdar selaku kepala poskestren. Ust. H. Amiruddin, S.H sebagai pelaksana dan pengendali keuangan dana poskestren. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat oleh bendahara poskestren sebagai bukti laporan keuangan dana poskestren.

#### **Responsibilitas Dana Poskestren**

Adanya pertanggung jawaban mulai dari kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan.

Dengan adanya pertanggung jawaban dalam organisasi seseorang mempunyai keharusan untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya, Namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkannya. (KNKG, 2006). Responsibilitas merupakan bentuk kepatuhan poskestren terhadap hukum dan perundang-undangan tentang pelayanan poskestren serta tanggungjawab sosial poskestren terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar.

Namun hal ini juga disampaikan dari hasil pengumpulan data yang berhasil penulis kumpulkan melalui metode wawancara dengan petugas poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan mengatakan bahwa pertanggung jawaban poskestren telah melaksanakan kepatuhan peraturan yang berlaku. Seluruh petugas poskesren menaati peraturan poskestren yang sudah ada, namun terkadang masih ada juga yang melanggarnya. Kemudian terkait dengan standar penggajian dan perlindungan hidup, poskestren sudah melakukan sesuai dengan peraturan.

#### ***Realisasi anggaran dana poskestren***



<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Saldo awal (periode sebelumnya)	16.210.000
2	Pengembangan penyuluhan	4.500.000
3	Penyemprotan nyamuk	2.500.000
4	Sarana prasarana	6.000.000
5	Belanja obat-obatan	4.000.000
	<b>TOTAL</b>	13.000.000

(Sumber Laporan poskestrentahun anggaran 2018)

Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana poskestren sebesar Rp. 10.000.000 Jumlah yang digunakan tidak melebihi dengan dana poskestren yang diterima oleh pihak poskestren. Realisasi anggaran dana poskestren digunakan dengan baik, karena dapat dilihat bahwa antara dana yang diterima dapat mencukupi seluruh kebutuhan untuk mengoperasikan kegiatan poskestren secara maksimal.

#### **Independensi dana poskestren**

Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk melancarkan pelaksanaan organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi dalam perusahaan adalah sebagai berikut: (1). Masing-masing organ organisasi poskestren harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (2). Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. KNKG (2006) Independen yaitu poskestren harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. poskestren harus mengelola secara profesional, bila terjadi konflik dalam poskestren maka seluruh pihak ikut mencari solusinya dan hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan

Namun hal juga disampaikan dari hasil pengumpulan data yang berhasil penulis kumpulkan melalui metode wawancara dengan petugas poskestren Miftahul Ulum Betet Pamekasan mengatakan bahwa poskestren telah menerapkan konsep independen yaitu pihak poskestren di dalam mengelola baik dari kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dikelol SENDIRI oleh petugas poskestren, seperti halnya poskestren melakukan penyuluhan terhadap santri dalam satu bulan sekali. Di samping itu poskestren juga melakukan penyemprotan nyamuk di area pondok guna menghindarkan penyakit pada santri.

**Fairnes/kesetaraan**

Terkait dengan adanya keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian poskestren telah memberikan kesempatan kepada seluruh petugas untuk menyampaikan pendapat dan memberi saran. Perlakuan terhadap petugas yang melakukan kesalahan juga diperlakukan secara adil dan tidak adanya saling menjahui satu sama lain. Poskestren juga menerima saran dan kritik serta komplain dari dari luar. KNKG (2006) menyebutkan bahwa poskestren harus senantiasa memperhatikan kepentingan pasien serta karyawan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Poskestren memberikan kesempatan bagi seluruh *stakeholder* untuk memberikan saran dan pendapatnya untuk memajukan poskestren.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Prinsip transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan warga pesantren melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Mengetahui prinsip transparansi pengelolaan dana poskestren, peneliti memperoleh data melalui metode dokumentasi dan wawancara dengan petugas poskestren. Hal ini untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan poskestren dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini menggamarkan bahwa penyampaian informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam poskestren sudah baik. Dilihat dari aspek penyampaian visi, misi, kebijakan poskestren, serta informasi yang dibagikan terhadap santri dan masyarakat. Visi dan misi poskestren sudah diketahui seluruh santri dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian mengenai informasi laporan keuangan dalam poskestren hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti ketua dan bagian keuangan.

Kebijakan pada poskestren sudah disampaikan secara lisan dan tertulis sehingga tidak ada petugas yang tidak mengetahui kebijakan poskestren dan setiap satu tahun sekali poskestren mengadakan rapat dimana untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut. Poskestren juga melakukan evaluasi setiap bulan terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Mengenai transparansi, poskestren juga memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di poskestren serta informasi tentang petugas dan dokter yang melayani disana sebagai bentuk transparansi terhadap pasien. Transparansi perlu dijalankan dalam upaya memperlanar semua kegiatan atau program (Anggraini, 2013).

Pihak poskestren juga menjelaskan tentang penggunaan dana poskestren secara terperinci meliputi sumber keuangan, jumlah yang diterima dalam 1 bulan dan 1 tahun, rencana kegiatan yang akan di lakukan serta penggunaan dana poskestren yang benar sesuai pedoman petunjuk teknis, sehingga memudahkan petugas poskestren untuk mengetahui informasi tentang dana poskestren

Dilihat dari salah satu evaluasi tentang akuntabilitas yaitu mengenai rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ serta kinerja dalam poskestren. Pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing organ dalam poskestren diakui tentang akuntabilitas atau pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik karena sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang sudah direncanakan. Penyampaian dan penjelasan mengenai tanggungjawab masing-masing di sampaikan secara tertulis atau lisan. Mengenai alur pertanggung jawaban pun sudah

sangat jelas. Setiap petugas harus melaporkan setiap kegiatannya kepada pihak yang bertanggung jawab.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan memberikan kepercayaan kepada pihak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kesehatan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan didukung oleh beberapa indikator meliputi keterlibatan semua pihak dalam penetapan aturan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur atau rencana pelaksanaan yang telah disepakati (Setiyani, 2014).

Dilihat dari salah satu evaluasi tentang responbilitas yang merupakan bentuk kepatuhan organisasi terhadap hukum dan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial orgnisasi terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar. KNKG (2006) menelaskan bahwa responsibilitas merupakan bentuk kepatuhan poskestren terhadap hukum dan perundang-undangan tentang pelayanan poskestren serta tanggung jawab sosial poskestren terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan disekitar.

Seluruh petugas poskestren sudah menaati peraturan poskestren yang sudah ada, namun terkadang masih ada juga yang melanggarnya. Poskestren juga sudah memberikan pelayanan terhadap santri sesuai aturan yang berlaku. Kemudian poskestren juga sudah patuh terhadap peraturan pelayanan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan.

Pertanggung jawaban posketren telah melaksanakan kepatuhan peraturan yang berlaku. Seluruh petugas poskesren sudah mentaati peraturan poskestren yang sudah ada, namun terkadang masih ada juga yang melanggarnya. Kemudian terkait dengan standar penggajian dan perlindungan hidup, poskestren sudah melakukan sesuai dengan peraturan.

Pertanggung jawaban poskestren dapat dikategorikan baik. Karena poskestren mampu menjalankan tugas dan bertanggung jawab dalam mengelola dana poskestren yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembukuan dan pelaporan dana poskestren secara berkala. Hal ini sangat penting dikarenakan dana poskestren merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan mutu poskestren.

Dari sisi independen, poskestren sudah maksimal dalam mengimplementasikannya, karena seluruh petugas poskestren sudah menglola sesuai aturan yang di tetapkan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kemudian konflik internal yang terjadi dalam poskestren tidak menjadi halangan dalam membuat suatu keputusan. KNKG (2006) Indepen yaitu poskestren harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Poskestren harus mengelola secara profesional, bila terjadi konflik dalam poskestren maka seluruh pihak ikut mencari solusinya dan hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para petinggi untuk membuat suatu keputusan

Selanjutnya di evaluasi dari sisi kedilan dan kesetaraanya poskestren sudah baik karna poskestren telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untk menyampaikan saran dan kritik dan di perlakukan sama. KNKG (2006) *Fairness* yaitu poskestren harus senantiasa memperhatikan kepentingan pasien serta karyawan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Poskestren memberikan kesempatan bagi seluruh *stakeholder* untuk memberkan saran dan pendapatnya untuk memajukan poskestren.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Transparansi Dana Poskestren sudah transparan mengenai anggaran. Kebijakan poskestren disampaikan secara lisan dan tertulis, Kemudian poskestren juga sudah transparan terhadap warga pesantren dengan memberikan informasi yang di butuhkan (2). Akuntabilitas Dana Poskestren sudah dilaksanakan dengan baik. Poskestren sudah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab secara jelas kepada warga pondok pesantren dengan melakukan penyajian serta melaporkan segala tindak lanjut kegiatan dalam bidang administrasi keuangan yang kemudian di laporkan kepada yang bertanggungjawab sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi (3). Responibilitas (Pertanggungawaban) dana Poskestren telah melaksanakan kepatuhan peraturan yang berlaku namun masih belum maksimal. Seluruh petugas poskesren sudah mentaati peraturan poskestren yang sudah ada, namun terkadang masih ada juga yang melanggarnya (4). Independen Poskestren telah dilaksanakan dengan baik dengan mengelola kegiatan dan program yang telah di tetapkan dengan pengelolaan sendiri oleh petugas poskestren (5). Fairnes atau Kesetaraan poskestren sudah dilakukan berdasarkan keadilan yaitu dengan memberikan kesempatan bagi seluruh warga pondok pesantren untuk memberikan saran dan pendapatnya untuk memajukan poskestren. Kemudian poskestren juga memperlakukan seluruh karyawan secara adil tidak memandang adanya perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2013), *Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1 No. 2.
- Arikunto (2002) *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta Kencana:
- Azheri (2012) *Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. pupuk kujang nusantara*. Tesis Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Handoko (2008) *Membedah Konsep dan Aplikasi Good Corporate Governance (GCG)* Surabaya: Media Grapka
- Komite Nasional Kebijakan Governane (KNKG) (2006) *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Indonesia, Jakarta.
- Levin (2005) *The Power of Good corporate governance. Teoridan Implementasi*
- Matthaw Dan Huberman, (2004) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:
- Mulyati (2011) *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Minarti, Sri (2011), *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media.

- Mursitawati (2014), *Good Corporate Governance*. Jakarta. SinarGrafika.
- Nanang (2011) *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PerumBulog*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Parasatyo (2007), *Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren*, Jakarta:
- Putri (2017), Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sector pertambangan di bursa efek indonesia (BEI). Skripsi Fakultas Ekonomi Uns
- Qomar (2006), *Pedoman Penyelenggaraan Poskestren Jakarta:tahun 2013 Salemba Empat*, Jakarta:
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:
- Sukmadinata (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:
- Surya, (2008)*Dasar-dasar komunikasi kesehatan. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta:
- Todorovice (2012), *Penggunaan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran*. Bandng:
- Ulfa (2017), *Pengaruh Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahyuningsih. (2015), *Evaluasi Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Dr Moewardi Surakarta*. Apikes Citra Medika Surakarta.